

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam suatu organisasi baik itu organisasi publik ataupun organisasi privat pasti memiliki seorang pemimpin. Pemimpin merupakan posisi penting dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai pengatur jalannya organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasinya. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang mumpuni agar organisasi tidak hanya berjalan efektif dan efisien, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh anggota organisasi.

Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan organisasi, motivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sesama kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang luar, kelompok atau organisasi.¹



Menurut Nawawi dan Martin, kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan menggerakkan atau memotivasi sejumlah orang agar secara serentak melakukan kegiatan yang sama dan terarah pada pencapaian tujuannya. Oleh sebab itu hal yang penting dari kepemimpinan adalah adanya pengaruh dan

¹Veithzal Rivai, dan Deddy Mulyadi. 2011. “Kepemimpinan dan Perilaku Organisme”, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal: 2-3.

efektifnya kekuasaan dari seorang pemimpin sebab, jika seseorang berkeinginan mempengaruhi perilaku orang lain maka aktivitas kepemimpinan telah mulai tampak relevansinya.

Robbins menyebutkan bahwa organisasi membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang kuat untuk mencapai efektifitas maksimal. Lebih lanjut, dia mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok orang terhadap pencapaian tujuan. Dalam usaha mempengaruhi para pegawai, pemimpin harus dapat menciptakan visi masa depan, menginspirasi para pegawai terhadap pencapaian visi tersebut, memformulasikan rencana yang detail, menciptakan organisasi yang efisien, dan melihat lebih lanjut operasi harian.²

Pada hakekatnya, esensi dari kepemimpinan terletak pada moral, kualitas dan kapabilitasnya. Apalagi situasi dan kondisi politik Indonesia saat ini sangat rawan dengan terjadinya disintegrasi, dimana tingkat kemajemukan sangat tinggi. Oleh karena itu sangat diperlukan seorang individu yang menegakkan kepemimpinan lintas rasial, etnis agama, berwawasan kemanusiaan yang modern dan tidak mengeksploitasi perbedaan itu. Kepemimpinan merupakan sebuah proses yang saling mendorong melalui keberhasilan interaksi dari perbedaan individu, mengontrol daya manusia dalam mengejar tujuan bersama.³ Jadi kepemimpinan merupakan kehendak mengendalikan apa yang terjadi, pemahaman merencanakan tindakan, dan kekuasaan untuk meminta penyelesaian tugas, dengan menggunakan kepandaian dan kemampuan orang lain secara kooperatif.⁴

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seorang pemimpin dapat dikatakan sukses jika pemimpin tersebut mampu menjadi pendorong bagi bawahannya dengan

² Robbins, Stephen P. “ *Organizational Behavior: concepts, Controversiess*”, Pearson South Africa, 1990

³ Kencana, F. X. V. “ *Meningkatkan Efisiensi, Produktivitas dan Profitabilitas*. Yogyakarta: Andi B, c, . 2003

⁴ Donald G. Firesmith, Brian Henderson-Sellers, and Ian Graham, Cambridge University Books, New York, New York, June 1998, pp. 276, ISBN: 1-884842-75-5.

menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang dapat memacu perkembangan dan memberikan pengaruh positif kepada bawahannya. Dalam roda pemerintahan para pemimpin sangat diharapkan memiliki karakter gaya kepemimpinan yang efektif karena mempunyai tugas penting dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang akan dihadapi dalam menjalankan pelayanan publik. Oleh sebab itu, sangat diharapkan adanya kelebihan-kelebihan khusus serta komitmen dalam menggerakkan potensi sumber daya manusia yang dipimpin.⁵

Dalam organisasi publik seperti organisasi pemerintahan, pemimpin tidak hanya berhubungan dengan anggotanya (perangkat) namun pemimpin juga berhubungan dengan masyarakat secara langsung. Pemimpin pada organisasi pemerintahan memiliki fungsi dan tugas lebih kompleks sebab berkaitan dengan kedudukannya dalam seluruh proses kegiatan dan sebagai pemecah masalah. Peran pemimpin dalam organisasi pemerintahan juga memastikan agar organisasi yang dipimpinnya tidak hanya berjalan efektif dan efisien tetapi juga dapat mensejahterakan masyarakatnya.⁶

Peristiwa besar dan bersejarah tidak terlepas dari persoalan kepemimpinan. Masalah kepemimpinan telah menarik perhatian sampai saat ini, hal ini menandakan bahwa masalah kepemimpinan merupakan masalah yang masih menarik untuk dikaji terlebih keberadaan perempuan sebagai pemimpin. Pada masa penjajahan Belanda terkait kepemimpinan yang jadi perhatian bagi mereka adalah laki-laki, karena mereka menganggap bahwa perempuan itu tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa. Perempuan seringkali dilihat berdasarkan standarisasi laki-laki. Perempuan-perempuan yang memenuhi standar kepemimpinan laki-laki yang hanya diakui efektivitasnya sebagai pemimpin.⁷ Selain itu, persentase perempuan sebagai pemimpin dibandingkan populasi perempuan secara keseluruhan, jauh lebih rendah dibandingkan dengan

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ Klenke, K. (2006). Cinderella stories of women leaders. *Journal of Leadership Studies*, 9(2), 18-28.

persentase laki-laki sebagai pemimpin.⁸

Konsep kepemimpinan di era modern saat ini pada praktiknya sudah tidak dikaitkan lagi dengan isu-isu gender. Perempuan sangat diberi ruang untuk mengaktualisasikan dirinya di berbagai organisasi privat atau publik. Dalam catatan wacana pemimpin perempuan telah memancing polemik dan debat antara yang pro maupun kontra terhadap pemimpin perempuan dalam sebuah negara. Sejarah menunjukkan bahwa banyak sekali pemimpin perempuan yang sukses dalam memimpin sebuah bangsa. Ini merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat disangkal lagi, bahwa perempuan sekarang ini telah mampu menduduki berbagai jabatan penting dalam masyarakat.⁹

Dalam suatu penelitian tentang kepemimpinan, suatu organisasi berjalan efektif dapat dilihat dari gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin. Gaya kepemimpinan memiliki pengaruh kuat terhadap kinerja karyawan atau anggotanya dalam melaksanakan tugas. Dalam beberapa kasus tertentu seorang pemimpin harus mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi yang terjadi. Ketika pemimpin menyadari bahwa anggotanya memiliki kemampuan yang rendah dan sering melakukan kelalaian, maka seorang pemimpin dapat menerapkan gaya kepemimpinan otokratik.

Menurut teori yang disampaikan oleh Sondang P. Siagian terdapat lima gaya kepemimpinan, yaitu:

1. Otokratik

Gaya kepemimpinan yang mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi.

2. Paternalistik – Maternalistik

⁸ Bass, B.M. (1990), *Bass & Stogdills: Handbook of leadership: Theory, research & managerial applications* (3rd Ed). New York The free Press

⁹ Awuy T. F, *Refleksi atas Kekuasaan*. www.kompas.com. 1999

Gaya kepemimpinan ini menggambarkan bahwa seorang pemimpin terlihat seperti kebakakan (paternalistik) dan keibuan (maternalistik).

3 Demokratik

Gaya kepemimpinan ini menggambarkan bahwa seorang pemimpin selalu melibatkan bawahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan atau organisasi seperti pengambilan keputusan.

4 *Laizzes Faire*

Gaya kepemimpinan ini menggambarkan seorang pemimpin yang memberikan keleluasaan terhadap bawahannya.

5 Kharismatik

Gaya kepemimpinan ini menggambarkan bahwa seorang pemimpin memiliki daya tarik yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut dengan sangat besar.

Penjelasan mengenai teori gaya kepemimpinan yang disampaikan oleh Sondang P. Siagian diatas juga berlaku terhadap pemimpin perempuan yang harus mampu membaca situasi dan kondisi dalam menerapkan gaya kepemimpinan. Sejalan ini dalam suatu penelitian tentang gaya kepemimpinan perempuan, bahwa gaya kepemimpinan perempuan mampu mengarahkan, membimbing dan mengatur bawahan dengan baik serta mampu membangun suasana kekeluargaan dalam organisasi. Kepemimpinan perempuan juga mampu menciptakan dan memberikan iklim komunikasi yang positif serta dapat meningkatkan kinerja pegawai yang baik.¹⁰



¹⁰ Hariyono. 2018. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Perempuan terhadap Iklim Komunikasi dan Kinerja Pegawai pada Dinas Sosial", dalam *Jurnal Simbolika*, 4 (2). 73-85.

Kebijakan otonomi daerah seluas-luasnya telah memberi ruang pada daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dan mendorong berbagai upaya menghidupkan kembali nilai-nilai budaya lokal. Adat dan tradisi juga dijadikan alasan untuk memberikan ciri khas daerah dalam pemerintahan daerah. Berdasarkan prinsip dan semangat otonomi daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan adanya seseorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata.¹¹

Luasnya pengertian daerah dalam prinsip otonomi daerah kemudian diperjelas dengan terbitnya Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa dimana yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Pada Provinsi Sumatera Barat proses penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dimanfaatkan untuk menata kembali pemerintahan Nagari sebagaimana mestinya berdasarkan adat *basandi syarak syarak basandi kitabullah*¹³ dengan dikeluarkannya Perda No. 7 Tahun 2018

¹¹ Budiman, Arief. 1995. "Teori Pembangunan Dunia Ketiga". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm.54.

¹² Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa

¹³ *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* merupakan suatu falsafah Minangkabau yang dalam bahasa Indonesia berarti "adat berdasarkan agama, agama berdasarkan kitab Allah". Agama dalam hal ini bisa diartikan sebagai agama Islam karena agama sebagian besar orang Minangkabau adalah Islam. Sementara itu, kitab Allah yang dimaksudkan adalah Alquran. Jika dikaji lebih dalam lagi, falsafah ini mengandung makna yang sangat dalam. Secara umum, falsafah ini menjelaskan bahwa Minangkabau merupakan sebuah budaya atau suku yang berlandaskan

tentang Nagari. Dalam prosesnya penyelenggaraan pemerintahan Nagari dipimpin oleh Wali Nagari. Wali Nagari berperan untuk mengkoordinasikan seluruh kepentingan masyarakat Nagari dalam setiap pengambilan keputusan. Wali Nagari bukan hanya dituntut mampu mengelola perangkat yang ada dalam struktur Nagari nya saja, tetapi juga sebagai pemimpin untuk seluruh warga Nagari nya. Peranan Wali Nagari ini menjadi sangat penting jika mengingat upaya-upaya pemerintah selama ini untuk pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia menjadi lebih madani.

Konsep kepemimpinan Nagari apabila dihubungkan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka Wali Nagari dituntut untuk menjadi pemimpin yang siap menjadi perantara masyarakat, sehingga pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan baik dan bijak, sehingga diharapkan dapat menyalurkan aspirasi rakyatnya. Wali Nagari menjadi kunci dari keberhasilan pembangunan nagari khususnya terkait pemberdayaan masyarakat di daerahnya.

Peran Wali Nagari sebagai seorang pemimpin baik perempuan atau laki-laki tetap harus dijalankan, yaitu dalam memberdayakan masyarakat Nagari. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menolong masyarakat dalam menciptakan “masyarakat madani” sehingga masyarakat menjadi lebih mandiri dan lebih berdaya terutama dalam meningkatkan perekonomian keluarga, yang akan berdampak pada meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa yang dipimpinnya.

Berdasarkan regulasi pemerintahan Nagari, perempuan memiliki peluang terbuka untuk menjadi pimpinan Nagari karena dapat dilihat pada salah satu syarat untuk menjadi pemimpin Nagari adalah bahwa mereka merupakan anak yang berasal dari Nagari tersebut, artinya Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari menjamin hak antara laki-laki dan perempuan

kepada Allah swt.Selain itu,adat dan agama pun tidak bisa dipisahkan.Keduanya senantiasa berjalan beriringan.Hal ini juga dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa sistem Pemerintahan Nagari dipandang efektif guna menciptakan ketahanan agama dan budaya berdasarkan tradisi dan sosial budaya masyarakat Sumatera Barat.

untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai Wali Nagari selama itu merupakan anak asli dari nagari tersebut.¹⁴ Adanya kesamarataan hak antara perempuan dan laki-laki dalam konteks kepemimpinan ini juga telah dibuktikan dengan banyak ditemukannya pemimpin Nagari yang berstatus perempuan salah satunya adalah Wali Nagari di Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Nagari terluas di Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari Koto Rawang memiliki banyak potensi baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang cukup besar dan bernilai. Dalam dinamika pemerintahan Nagari Koto Rawang untuk pertama kali dalam sejarah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Wali Nagari perempuan. Fakta ini dibuktikan dengan terpilihnya Nova Rita sebagai Wali Nagari di Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2012.

Keterpilihan Nova Rita sebagai Wali Nagari yang *notabene* perempuan sangat menarik perhatian karena pada tahun 2012 merupakan pemilihan Wali Nagari pertama di Kabupaten Pesisir Selatan. Munculnya sosok Nova Rita berasal dari dukungan sekelompok masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang dipercaya sebagai Wali Nagari karena dianggap memiliki jiwa kepemimpinan dan dermawan. Disamping itu latar belakang Nova Rita yang merupakan istri dari seorang Tentara Negara Indonesia yang juga berpengaruh di tengah masyarakat menjadi faktor tambahan atas terpilihnya Nova Rita sebagai Wali Nagari yang menjadikannya sebagai Wali Nagari perempuan pertama di Kabupaten Pesisir Selatan.

Perempuan dipandang sebagai manusia rasional dan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki. Berdasarkan pemikiran inilah maka kepemimpinan perempuan dalam masa kini

¹⁴ kandar, Israr. 2012. Wali Nagari Perempuan di Era Reformasi: Studi Kasus Terpilihnya Wali Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009. Jurnal Aspirasi. Vol. 2 No. 1 Th. 2011. Hal 7.

bukan lagi menjadi hal yang harus diperdebatkan. Hanya saja perlu diingat, perempuan dalam menjalankan peran sebagai pemimpin, dituntut juga memiliki beberapa hal penting, antara lain; Keinginan menerima tanggung jawab, mencapai tujuan yang realistis, bekerja keras dan cerdas, bersikap objektif, menentukan skala prioritas, mampu berkomunikasi dengan efektif, memiliki orientasi akan masa depan, kemampuan membimbing, berperilaku bijaksana dengan kekuasaan dan memiliki kepribadian yang kuat.

Stogdil menyatakan bahwa seseorang tidak menjadi pemimpin melalui pemilihan kombinasi dari sifat-sifat saja, tetapi juga karakteristik aktivitas pendidikan termasuk mengenali peranan kultur dalam keluarga dan masyarakat, agar dapat mempunyai pengaruh kuat terhadap para pegawai di birokrasi pemerintahan, pemimpin harus dapat mengerti gaya kepemimpinan yang tepat untuk dipraktekkan. Dalam memilih dan mempraktekkan gaya kepemimpinan, seorang pemimpin harus memperhatikan faktor-faktor internal serta eksternal birokrasi. Gaya kepemimpinan merupakan faktor yang penting dalam pencapaian efektifitas pemimpin. Pilihan gaya kepemimpinan yang tepat dan yang menghubungkan secara tepat dengan motivasi eksternal dapat mendorong tercapainya baik tujuan individu dan organisasi.¹⁵ Jika kepemimpinan efektif, maka dapat secara positif mempengaruhi kinerja para pegawai sehingga meningkatkan kinerja organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul Gaya Kepemimpinan Wali Nagari Perempuan di Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012-2018.



1.2. Rumusan Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan merupakan keberadaan pemerintah untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat secara demokratis. Keberadaan pemerintah bertujuan untuk

¹⁵ Sartono. *Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media, 2004. Hal 77-103

meningkatkan pencapaian HDI (*Human Development Index*) yang dilakukan melalui pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tataran pemerintahan tingkat bawah seperti Desa/Nagari, seorang pemimpin dituntut untuk mampu menerapkan kepemimpinannya dengan baik karena pemimpin tidak hanya sebagai atasan di kantor tetapi juga menjadi tokoh di tengah masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan sangat berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Wali Nagari merupakan pemimpin pemerintahan Nagari dengan dibantu aparat Nagari dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menjalankan kepemimpinannya Wali Nagari dituntut memiliki gaya dan perilaku kepemimpinan yang mampu memberdayakan masyarakat Nagari guna mencapai keberhasilan sebagai seorang Wali Nagari. Sehingga mampu mengembangkan kepemimpinannya agar mampu menggerakkan masyarakat Nagari, untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Nagari.

Terlepas dari pandangan negatif mengenai kepemimpinan perempuan, kepemimpinan Wali Nagari perempuan sendiri memberikan nuansa yang berbeda dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahmudi menunjukkan bahwa Kepala Desa perempuan memberikan banyak pengaruh positif terhadap warga dan kemajuan desa. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tanggung jawab dan perjuangannya dalam memimpin desa agar dapat menjadi desa yang maju.¹⁶

Keberadaan Nova Rita sebagai Wali Nagari di Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan membawa pengaruh positif dalam proses pembangunan di Nagari Koto Rawang. Selama menjabat sebagai Wali Nagari di Koto Rawang seperti pembangunan kantor Wali Nagari tahun 2012, pembukaan jalan usaha tani bagi masyarakat pada tahun 2014, pembangunan jembatan Koto Rawang, perbaikan Puskesmas Koto Rawang pada Februari 2015,

¹⁶ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press, Yogyakarta. 2011. Hal 271

pembangunan gedung PAUD pada bulan Mei 2017 serta program yang mendukung kegiatan pemuda-pemudi di Nagari Koto Rawang.

Berdasarkan data awal yang peneliti temukan di lapangan, peneliti berasumsi bahwa dalam masa kepemimpinan Nova Rita sebagai Wali Nagari dominan menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang melibatkan bawahan dan pihak-pihak lainnya secara aktif seperti jejak pendapat dan konsultasi dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan. Asumsi ini diperkuat bahwa Nova Rita sebagai Wali Nagari tidak memiliki rekam jejak sebagai pemimpin atau sebagai penyelenggara pemerintahan. Keterpilihan Nova Rita pada pemilihan Wali Nagari dilatarbelakangi oleh sosok Nova Rita yang aktif di tengah masyarakat dan sebagai istri dari seorang TNI sehingga masyarakat cenderung menilai bahwa Nova Rita mampu menjadi Wali Nagari. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang tokoh Bundo Kandung di Nagari Koto Rawang, yang menyatakan bahwa:¹⁷

“..beliau memang alah lamo tinggal disiko beserta lakinyo dari dulu sukodatang ka Musrebang, selalu ikuik dalam proses pembangunan, memang dulu awalnyo masyarakat maminta untuak suami nyo yang TNI tapi karna lakinyo menolak karna harus bertugas maka kami masyarakat maminta istrinya untuak naiak, karna memang dicaliak pun beliau memang lah Nampaknya pemimpinnyo. Beliau (Nova Rita) memang sudah lama tinggal di Koto Rawang Kabupaten Pesisir Selatan beserta suaminya yang merupakan anggota TNI, awalnya masyarakat memang maminta suami beliau untuak naik sebagai wali nagari, namun karna suami beliau masih memiliki tugas yang harus diemban sebagai TNI beliau menolak, lalu masyarakat maminta istrinya (Nova Rita) untuak mencalonkan sebagai wali nagari karna beliau memang terlihat jiwa pemimpinnya.”

Maka dari itu, rendahnya pengalaman dan kompleksnya dinamika Nagari mengharuskan Nova Rita untuk banyak berkonsultasi dengan bawahan dan tokoh-tokoh masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pengambilan keputusan.

¹⁷ Wawancara bersama Jusmawati salah seorang tokoh Bundo Kandung di Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Kurai di Kabupaten Pesisir Selatan di kediaman beliau pada tanggal 3 Mei 2020 pk1.10.00 WIB.

Keberhasilan Nova Rita dalam melaksanakan pembangunan di awal kepemimpinan tidak bisa dilepaskan dari gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam mempengaruhi bawahannya dan masyarakat setempat untuk ikut serta membantu proses pembangunan yang dilakukan. Dalam hal ini tampak bahwa gaya kepemimpinan menjadi aspek pendukung keberhasilan program yang dijalankan. Hubungan yang dibangun antara pimpinan dengan bawahan dan pimpinan dengan masyarakat menghasilkan suatu kontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan. Seperti yang dinyatakan oleh Sweeney dan McFarlin yang menyatakan bahwa “Pada lingkungan apapun, memperhitungkan konteks mencakup bagaimana karakteristik situasi, pemimpin, dan pengikutnya, semuanya berkombinasi mempertajam strategi perilaku pemimpin”. Dengan demikian gaya kepemimpinan yang efektif atau optimal merupakan hasil penerapan strategi mempengaruhi pegawai dengan mempertimbangkan dan mengkombinasikan karakteristik pemimpin, pegawai (pengikut), dan konteks situasi.



Keberhasilan Nova Rita sebagai Wali Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya untuk meningkatkan kualitas daerahnya. Gaya kepemimpinan Nova Rita yang dinilai tegas dan sangat berdedikasi terhadap tugas serta dikenal dekat dengan masyarakat mampu membawa Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan berkembang dengan pesat. Oleh sebab itu berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah diatas, pada penelitian ini yang merupakan rumusan masalah penelitian adalah bagaimana gaya kepemimpinan Nova Rita sebagai Wali Nagari yang berstatus perempuan di Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2012-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian adalah mengidentifikasi dan menjelaskan gaya kepemimpinan Nova Rita sebagai Wali Nagari yang berstatus perempuan di Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan periode tahun 2012-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis atau akademis, penelitian ini mengidentifikasi gaya kepemimpinan dari seorang perempuan yang menjadi seorang Wali Nagari di Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan analisis ilmiah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemimpin selanjutnya untuk menerapkan gaya kepemimpinan di Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

